



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI RIAU
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)
KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023

NOMOR: 197/BPSDM/5.3/2023/664

NOMOR: SPK.20/PKS-PPSDM/X/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (23-10-2023), bertempat di Riau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. ASRIZAL, M.Pd.**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1/I/2022 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, beralamat di Jl. Ronggowarsito No. 14 Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P** selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec. Makasar, Jakarta Timur, 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 100.4.7.1/89/SJ dan Nomor: M/1/KS.06/II/2023 Tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 371);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 25).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Tahun 2023 di Lingkungan Provinsi Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Tahun 2023 di Lingkungan Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Tahun 2023 di Lingkungan Provinsi Riau berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2
OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

Objek Nota Kesepahaman ini adalah pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan pada Provinsi Riau yang diusulkan untuk mendapat Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini yaitu Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Tahun 2023 di Lingkungan Provinsi Riau;

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyeleksi dan mengirimkan nama peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menanggung, menyediakan dan menyetorkan pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini;

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- e. menyediakan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membayar honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menerima dan menetapkan peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
- b. menyampaikan jadwal dan kurikulum pelaksanaan kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan fasilitator dan Narasumber yang diperlukan selama pelaksanaan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
- d. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini;
- e. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan **PIHAK KESATU**; dan
- g. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima jadwal dan kurikulum pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan fasilitator dan narasumber untuk peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini dari **PIHAK KEDUA**;
- e. membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini bersama **PIHAK KEDUA**;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data usulan peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima setoran pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan fasilitator dan narasumber untuk peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini yakni ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama penyelenggaraan pelatihan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8
BERAKHIRNYA KERJA SAMA**

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berakhir bilamana:
 - a. Telah berakhir jangka waktunya; dan
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahu kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pemutusan Nota Kesepahaman.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian tambahan tertulis (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.
Jl. Ronggowarsito No. 14 Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Telepon : (0761) 28997
Email : bpsdm@riau.go.id

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

b. **PIHAK KEDUA**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur 13570.

Telepon: (021) 8000828;8090952;8090804

Email : Kerjasamappsdm@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Drs. ASRIZAL, M.Pd.

PIHAK KEDUA

HELMIATY BASRI, S.Sos., M.A.P

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA